

## **ABSTRAK**

**Abdul Ismail** dengan judul “Penerapan Pemberatan Pemidanaan Pada Pengulangan Tindak Pidana Khusus (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Ternate” dibawah bombing Anshar selaku pembimbing I dan Basto Daeng Robo selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah pemberatan pemidanaan yang dianut dalam KUHP dapat diterapkan pada Tindak Pidana Khusus;serta Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pemberataan pemidanaan terhadap pengulangan Tindak Pidana Khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, untuk menentukan apakah pemberatan pemidanaan yang dianut dalam KUHP dapat diterapkan pada Tindak Pidana Khusus, dan mengetahui penerapan pemberataan pemidanaan terhadap pengulangan Tindak Pidana Khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate.

Adapun hasil penelitian ini yang Pertama, pemberatan pemidanaan yang dianut dalam KUHP tetap dapat diterapkan pada Tindak Pidana Khusus, meskipun telah terdapat banyak perkebangan pemberatan pemidanaan yang memang sebelumnya belum diatur dalam KUHP namun seiring dengan perkembangan dan pembaruan hukum pidana maka penerapan pemberatan pemidanaan pada tindak pidana khusus juga mengalami perkembangan yang bahkan bisa dikatakan telah menyimpangi dari pada prinsip-prinsip yang dianut dalam KUHP. Namun hal demikian tidak menjadi sebuah masalah oleh karena sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku saat ini sangat jauh tertinggal dari perkembangan zaman.Kedua, pemberataan pemidanaan terhadap pengulangan Tindak Pidana Khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate tidak diterapkan oleh majelis hakim khususnya dalam putusan No: 22/Pid.Sus/2021/PN. Hal tersebut sangat nampak dalam pertimbangan hukum baik pertimbangan hukum yuridis yang sama sekali tidak ada uraian analisa hukum terkait pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwabahwa begitu pula dalam pertimbangan hukum sosiologis khususnya pada bagian hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, majelis hakim tidak mencantumkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang sama.

**Kata Kunci : Pemberatan Pemidanaan, Pengulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Kusus**

## **ABSTRACT**

*Abdul Ismail with the title "Implementation of Punishment Weights in Repetition of Special Crimes (Case Study at the Ternate District Court" under the guidance of Anshar as supervisor I and Basto Daeng Robo as supervisor II.*

*This study aims to determine whether the weighting of punishment adopted in the Criminal Code can be applied to Special Crimes; and To find out how the application of the distribution of punishment to the repetition of the Special Crimes in the Ternate District Court Decision.*

*This research is a normative legal research with a doctrinal approach, to determine whether the weighting of punishments adopted in the Criminal Code can be applied to Special Crimes, and to determine the application of the distribution of punishment to the repetition of Special Crimes in the Ternate District Court Decision.*

*The results of this study are first, the punishment weights adopted in the Criminal Code can still be applied to Special Crimes, although there have been many developments in the weighting of penalties which were not previously regulated in the Criminal Code, but along with the development and renewal of criminal law, the application of criminal penalties for criminal acts Special developments have also experienced developments that can even be said to have deviated from the principles espoused in the Criminal Code. However, this does not become a problem because as we know that the current Criminal Code is very far behind the times. Second, the distribution of punishment for the repetition of Special Crimes in the Ternate District Court Decision is not applied by the panel of judges, especially in Decision No: 22/Pid.Sus/2021/PN. This is very visible in legal considerations, both juridical legal considerations, where there is absolutely no description of legal analysis related to the repetition of criminal acts committed by the defendant; as well as in sociological legal considerations, especially in the section on matters that are aggravating to the defendant, the panel of judges does not state that the defendant previously been convicted of the same crime.*

**Keywords:** Weighting Criminal, Repetition of Criminal Acts, Special Crimes